


## **Pancasila sebagai Landasan Moral dalam Sistem Demokrasi Indonesia**

**Sabar Dumayanti Sihombing**

*Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia*

**Corresponding Author:**  [dumayantisihombing@gmail.com](mailto:dumayantisihombing@gmail.com)

### **ABSTRACT**

#### **ARTICLE INFO**

*Article history:*

Received

September 14,  
2023

Revised

October 01, 2023

Accepted

November 03,  
2023

This article aims to find out and explain the implementation of Pancasila as a moral foundation in the democratic system in Indonesia. The research method uses a qualitative study approach or descriptive approach where the basic material is obtained from the results of literature studies in book, journal and article sources. Based on the research results, it was found that Pancasila was used as the moral foundation of democracy in Indonesia because its values include aspects of spirituality, humanity, unity, democracy and social justice. This can be seen from the implementation of Pancasila Democracy, which is a system of government that is directed by the wisdom of wisdom and is based on the values of Pancasila, such as Belief in One Almighty God, just and civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy led by the wisdom of wisdom, and Social Justice.

**Keywords:** *Pancasila as a Moral Foundation, Indonesian Democratic System*

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

### **PENDAHULUAN**

Pancasila sebagai dasar negara dianggap sebagai jiwa dan pandangan hidup Indonesia, terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing memiliki makna mendalam. Pancasila juga menjadi panduan dan moral bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks social, politik, ekonomi maupun budaya.pancasila dirancang untuk mencerminkan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, kesatuan, dan keadilan. Lima hal itulah yang menjadi prinsip kemudian diberinama Pancasila kemudian diusulkan sebagai Weltanschauung Negara Indonesia yang merdeka (Agustinus, 2015).

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat (Noviati, 2013:2). Ciri khas utama demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Beberapa aspek kunci dalam demokrasi adalah adanya pemilihan umum, hak asasi manusia, aturan hukum, pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta adanya partisipasi rakyat.

Pancasila dalam demokrasi Indonesia berperan untuk memberikan landasan moral dan etika. Moral merupakan tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan yang dilakukan secara individu maupun kelompok sosial (Encyclopedia, 2019:1). Moral dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi pribadi maupun kelompok. Nilai-nilai dalam pancasila tidak hanya membimbing perilaku individu dan kelompok, tetapi juga membentuk dasar etis dan moral bagi

lembaga-lembaga pemerintahan tapi pancasila juga memastikan bahwa demokrasi berkembang dalam kerangka yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab.

Pancasila sebagai landasan moral dan filosofis negara, idealnya membimbing perilaku politik dan tata kelola pemerintahan. Nilai-nilai pancasila sangat perlu diimplementasikan agar dapat menjaga eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi dengan pancasila sebagai dasar negara. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa isu atau permasalahan yang menandakan adanya kesenjangan antara idealisme ini dengan praktik dalam kenyataan, seperti: maraknya korupsi, nepotisme, politik identitas, penegakan hukum yang lemah, dan rendahnya partisipasi publik dalam demokrasi. Tentunya masalah ini harus segera ditangani dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan menerapkan kembali nilai-nilai dasar pancasila.

### **Tinjauan Pustaka**

#### 1. Definisi dan Sejarah Pancasila

##### a. Asal-usul Pancasila

Pancasila sebagai falsafah atau dasar negara Indonesia lahir sebagai proses sejarah yang panjang. Menurut (Wahyu, 2015) Nilai-nilai pancasila bersifat fundamental, mutlak, universal dan abadi dan nilai-nilai yang merupakan berasal dari luhur budaya masyarakat yang tersebar di seluruh nusantara Asal-usul pancasila dapat ditelusuri berdasarkan rentetan peristiwa berikut

- 1) Awal kemerdekaan: dalam merespon tuntutan Jepang pada masa pendudukan, pada 1 Maret 1945 Soekarno membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk merumuskan dasar negara Indonesia.
- 2) Situasi yang kontroversial: munculnya kontroversi terkait dasar negara yang hendak dirumuskan. Kelompok Islam mendukung dasar negara berdasarkan syariah, sementara kelompok nasionalis ingin dasar negara yang inklusif.
- 3) Sidang BPUPKI: sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat ini, ada tiga (3) tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan dasar negara diantaranya yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Masing-masing memberikan pandangan terkait dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan pancasila sebagai dasar negara yang menggabungkan prinsip nasionalisme, internasionalisme, demokrasi dan ketuhanan.
- 4) Penyempurnaan dalam PPKI: setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pancasila terus berkembang. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyempurnakan rumusan pancasila. Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara dan diakui secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

##### b. Falsafah pancasila Dalam Konteks Sejarah Indonesia

Pancasila diadopsi sebagai dasar negara dalam UUD 1945 yang menjadi fondasi untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pancasila menjadi instrument penting dalam mempersatukan berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia. Ini membantu negara dalam mengarahkan social yang kompleks dan politik setelah

kemerdekaan. Selama orde baru, pancasila dijadikan sebagai alat untuk memperkuat stabilitas nasional dan menekan paham komunis, tetapi kemudian menimbulkan kritik terhadap penggunaan pancasila sebagai alat legitimasi hukum. Setelah era reformasi, pancasila kembali ditegaskan sebagai landasan demokrasi dan keberagaman di Indonesia. Upaya ini untuk mengembalikan esensi pancasila sebagai pengikat keragaman dan sebagai dasar moral dan etika bangsa.

2. Defenisi Moral

Moral adalah seperangkat ide, nilai, ajaran, prinsip atau norma yang ditunjukkan dalam tingkah laku, perbuatan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial. Moral adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Moral mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan, tanggung jawab, dan empati, serta mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Moral juga dapat dipahami sebagai suatu sistem nilai yang diinternalisasi oleh individu dan masyarakat, yang membentuk pandangan hidup dan perilaku mereka. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, moral juga dapat diartikan sebagai seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan pemerintah dan warga negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, moral menjadi landasan penting dalam pembentukan sistem politik dan hukum, serta dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pemahaman Tentang Demokrasi

a. Defenisi Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*Demokratia*" yang berarti kekuasaan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Ciri-ciri negara yang menganut system demokrasi adalah adanya pemilihan umum, adanya pengskusn terhadap hak asasi manusia, adanya hokum yang berlaku, penghargaan dan penerimaan terhadap keberagaman masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan, dan adanya keterbukaan serta pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Demokrasi berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

b. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Secara umum, demokrasi di Indonesia telah berkembang dari system yang awalnya cenderung sentralistik dan otoriter menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan menganut system demokrasi perwakilan. Ada empat perkembangan demokrasi dari masa ke masa yakni:

- 1) Demokrasi Parlementer (1945-1959): demokrasi ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka. Demokrasi parlementer adalah system demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Tetapi, konsep demokrasi ini tidak berjalan baik di Indonesia karena telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan social politik.
- 2) Demokrasi Terpimpin (1959-1965): adalah system pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan

berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Saat itu terjadi banyak peyelewengan terhadap pancasila seperti pembentukan organisasi komunis, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan GBHN yang bersumber dari pidato presiden.

- 3) Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1965-1998): saat itu telah diterapkan demokrasi pancasila yang menjadikan pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi terjadi banyak penyimpangan saat itu, yakni pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, kebebasan berpolitik bagi PNS, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat serta maraknya praktik KKN.
- 4) Demokrasi Reformasi (1998-sekarang): di era ini fase demokrasi sudah kembali ke prinsip dasar demokrasi yang ditandai dengan beberapa ciri seperti: adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, adanya penjaminan hak bagi warga negara serta rekrutmen politik yang inklusif.

#### 4. Pancasila Sebagai Landasan Moral

Pancasila mengandung kesatuan antara asas-asas budi pekerti dan moral. Secara etimologis pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Panca yang artinya "lima", dan sila yang berarti "asas" atau "kewajiban moral". Penetapan pancasila sebagai dasar negara bahwa asas-asas moral yang terkandung dalam pancasila menjadi landasan bagi seluruh penyelenggara negara (Kristogonus T. Lagno, Largus Nadeak, Yogi Sinurat, 2023)

#### 5. Pancasila dalam praktik demokrasi di Indonesia

##### a. Pancasila sebagai fondasi demokrasi

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai landasan ideologis yang membentuk karakteristik unik demokrasi di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada mekanisme politik, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan budaya (Sudrajat). Ini menciptakan bentuk demokrasi yang berupaya menyatukan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang beragam, serta menyeimbangkan kebebasan dengan keharmonisan sosial. Pancasila menjadi panduan dalam pembuatan kebijakan, pengelolaan pemerintahan, dan memastikan bahwa demokrasi Indonesia berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Dibandingkan dengan demokrasi di negara lain ada beberapa aspek yang menjadi ciri utama perbedaan demokrasi di Indonesia dengan negara lain, yakni sistem pemerintahan, adanya pemilihan umum, adanya kebebasan pers, desentralisasi, dan adanya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Perbandingan ini tentu bergantung pada kondisi dan konteks sejarah serta sosial masing-masing negara.

##### b. Tantangan dan Peluang

- 1) Tantangan: dalam menerapkan demokrasi pancasila meliputi tantangan dalam pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai pancasila, maraknya praktik korupsi, adanya konflik sosial dan politik identitas, pendidikan dan kesadaran masyarakat yang belum merata serta masih diperlukan penguatan lembaga demokrasi.
- 2) Peluang: sementara peluang dalam menerapkan demokrasi pancasila yakni keragaman budaya menjadi kekuatan dalam mempromosikan toleransi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi,

meningkatnya kerjasama antar lembaga serta penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu menyebarkan nilai-nilai pancasila.

## **METODE**

### **A. Desain penelitian**

Menurut Silaen dalam (Putri, 2022) desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan penelitian eksploratif dan deskriptif. Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D., 2017) Penelitian deskriptif eksploratif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian, namun hasil gambaran tersebut tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum. Sedangkan pendapat menurut (Arikunto, 2016) mengemukakan penelitian eksploratif merupakan penelitian yang berusaha menggali tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu.

### **B. Metode penelitian**

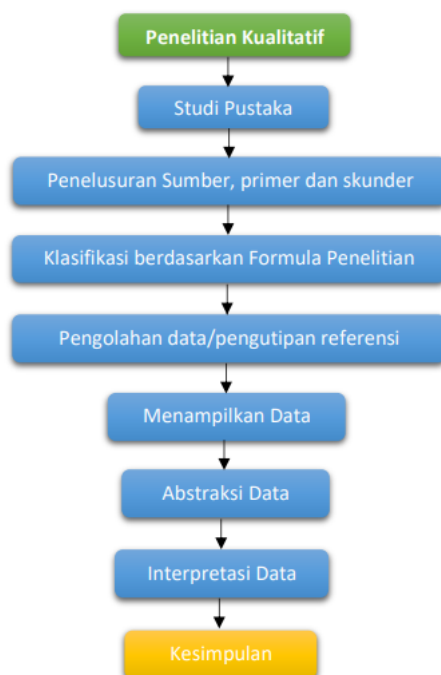
Metode penelitian adalah skenario pelaksanaan penelitian dijalankan (Darmalaksana, 2020) menggunakan pendekatan kajian kualitatif atau pendekatan secara deskriptif, dimana dasar bahannya diperoleh dari hasil studi literature pada sumber buku, jurnal, dan artikel. Secara umum, metode penelitian, sebagaimana telah ditegaskan terdahulu, ada dua jenis, yaitu penelitian kualitatif (Gunawan, 2013) Penelitian dilaksanakan untuk menghasilkan dan menguji teori. Penelitian kualitatif berkaitan dengan mengacu pada makna, konsep, defenisi dan juga pemaparan terhadap topic. Peneliti mencari sumber teori untuk dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan. Metode penelitian kualitatif menurut (Abdussamad, 2021) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi dan metode penelitian sosial dengan berbagai alternatif pendekatan (Suyanto, 2015)

### **C. Alat pengumpulan data**

#### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan (Darmalaksana W. , 2020).

Bagan 1. Jenis Penelitian Kualitatif Studi Pustaka



Dalam studi pustaka, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat artikel yang berkaitan dengan Prosedur Pelaksanaan penelitian melalui buku-buku dan dokumen.

2. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2016) menyatakan "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang". Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh penulis.

D. Teknik Analisis Data

Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah: Mengkategorikan data (Coding) ialah upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Interpretasi data ialah pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis atau dengan kata lain, interpretasi merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian (

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai persepsi pemustaka tentang pustakawan, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai persepsi pemustaka tentang kinerja pustakawan yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. *Conclusion/Verifying* (Pengarikan simpulan)

Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 1. Pengertian Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang membentuk sistem demokrasi di negara ini. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip utama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial.

Berikut adalah penjelasan pengertian Pancasila dalam sistem demokrasi Indonesia:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini menekankan pentingnya agama dan kepercayaan terhadap Tuhan sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rangkuti, 2023)
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab: Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia (Rangkuti, 2023)
- 3) Persatuan Indonesia: Prinsip ini menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, mengupayakan harmoni dan toleransi antarwarga negara, serta mengakui keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia (Rangkuti, 2023)
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan: Prinsip ini menekankan pentingnya keberagaman dan toleransi dalam masyarakat, serta mengakui hak organisasi politik, ekonomi, dan social (Rangkuti, 2023)
- 5) Keadilan Sosial: Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rangkuti, 2023)

Demokrasi Pancasila di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum yang demokratis, dimana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan Sistem Ketatanegaraan. Sistem politik Indonesia didasarkan pada prinsip Demokrasi Pancasila, yang membantu menjaga persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Pancasila Dijadikan Nilai-Nilai Demokratis Dalam Kehidupan Bangsa Dan Negara  
Pancasila dijadikan sebagai nilai-nilai demokratis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini terlihat dari pengakuan Gubernur Kaltim, Dr. H. Awang Faroek Ishak, yang menegaskan bahwa Pancasila adalah pedoman untuk penegakan demokrasi berbangsa dan bernegara (Kaltim, 2014). Demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Yunus, 2015)

Pancasila juga diartikan sebagai sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang dijadikan sumber norma moral dan kenegaraan lainnya (Wartini, 2021). Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai dan tujuan yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, seperti pengakuan dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghormati nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan (Pasla, 2023). Dengan demikian, Pancasila memegang peran penting dalam membentuk dan mengatur sistem demokrasi di Indonesia, serta menjadi landasan bagi nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Sebagai Landasan Demokrasi

Berikut disajikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan demokrasi (Sulistyorini, 2014) antara lain

1. Ketuhanan yang berkebudayaan: Menekankan pengakuan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan.
2. Kemanusiaan universal: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menghormati martabat dan hak asasi setiap individu.
3. Persatuan dalam kebhinnekaan: Menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam keragaman, serta mengakui dan menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia.
4. Demokrasi permusyawaratan: Menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.
5. Keadilan sosial: Menekankan pentingnya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang menjadi pedoman dalam menjalankan sistem politik dan mempengaruhi kebijakan publik (Rangkuti, 2023). Dengan demikian, nilai-nilai tersebut membentuk landasan demokrasi di Indonesia, yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila

## **KESIMPULAN**

Pancasila adalah falsafah negara sebagai landasan moral demokrasi. Seluruh kegiatan demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia harus merujuk kepada nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai landasan moral demokrasi di Indonesia karena nilainya yang mencakup aspek spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan social. Hal ini terlihat dari implementasi Demokrasi Pancasila, yang merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan,

dan Keadilan Sosial . Dengan demikian, Pancasila sebagai landasan moral demokrasi di Indonesia memungkinkan integrasi antara nilai-nilai demokratis dengan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga menciptakan sistem demokrasi yang unik dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia

## REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Agustinus. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama. *Jurnal Ilmiah Civis*. 5 (1).
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmalaksana. (2020). Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis. *Kelas Menulis Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan. *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaltim, H. P. (2014). Pancasila Pedoman Penegakan Demokrasi Bangsa. *Humas Prov. Kaltim*.
- Kristogonus T. Lagno, Largus Nadeak , Yogi Sinurat. (2023). Pancasila Sebagai Landasan Moral Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Seminar Nasional Filsafat Teologi*.
- Lagno, K., Nadeak, L., & Sinurat, Y. (2023). Pancasila Sebagai Landasan Moral Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 10-18.
- Pasla, B. N. (2023). Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, Prinsip, Asas, Dan Tujuan. *Jambi Prov*.
- Putri, E. Y. (2022). Pengaruh Kemudahan, Keamanan, Dan Resiko Terhadap Minat Menggunakan Ceria Digital Pada Anggota Kspps Bmt Assyafi'iyah Kc Metro. *Skripsi (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Metro*.
- Rangkuti, M. (2023). Demokrasi Pancasila Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, Dan Penerapannya. *Umsu Fakultas Hukum*.
- Sudrajat, A. (N.D.). Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Sulistiyorini, A. (2014). Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sma Se-Kecamatan Depok. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Suyanto. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media.
- Wahyu. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai Nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah Civis*, 5.
- Wartini. (2021). Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi Indonesia Dengan Menggunakan Model Project Based Learning Kombinasi Media Whatsapp Group Pada Siswa Kelas Viii-A Smp Negeri 1 Mantingan Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2020/2021. *Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*.

**Copyright Holder :**

© Sabar Dumayanti Sihombing (2023).

**First Publication Right :**

© Attractive : Innovative Education Journal

**This article is under:**

